

FPII

Gelar Musrenbang, Bupati Ipuk Bahas Penguatan Program Perlindungan dan Pelayanan Pekerja Migran

Hariyono - BANYUWANGI.FPII.OR.ID

Dec 13, 2024 - 18:17



BANYUWANGI – Puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi menggelar musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) untuk menjangkau masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran. Rembug yang digelar di Banyuwangi pada Kamis 12 Desember 2024 tersebut juga dihadiri Bupati Ipuk Fiestiandani. Rembug pekerja migran diikuti puluhan kader desa peduli buruh migran (desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi.

Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin mengatakan, rembug ini digelar untuk memberikan masukan guna penguatan program pemkab terkait perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan. Selain itu, rembug pekerja migran ini juga sebagai upaya menjangkau aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat.

“Gagasan yang terjaring dari sini akan kita usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,” ujar Uut.

Berbagai masukan menjadi bahasan dalam rembug tersebut. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Sucipto koordinator advokasi Garda PMI (NGO pegiat PMI) yang mengusulkan pembentukan satgas perlindungan pekerja migran. Menurutnya, ini akan efektif untuk percepatan penanganan permasalahan PMI.

Aspirasi juga datang dari Siti Khotimah yang mengusulkan dilaksanakannya sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Marak terjadi kasus anak PMI yang putus sekolah maupun menikah dini karena pergaulan bebas. Selain itu, berbagai usulan juga banyak disampaikan oleh peserta. Mulai perluasan informasi lowongan kerja bagi difabel ke Luar Negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga permohonan program penguatan literasi digital bagi PMI maupun purna PMI.

“Keluarga yang di rumah juga perlu kita beri edukasi agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,” ucap Siti Khotimah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, pemkab terus berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI dan keluarganya. Usulan dan masukan dari para peserta, kata Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk peningkatan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.

“Banyak program pemberdayaan yang kita gulirkan untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan agar masyarakat kurang mampu bisa mengembangkan usahanya. Ini juga kita berikan kepada purna pekerja migran agar mereka tetap berdaya setelah kembali. Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan. Sehingga, masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,” pungkas Ipuk. (***)